



## PUPKP SIAPKAN LAYANAN 'e-SURe' Penanganan Kawasan Kumuh Butuh Sinergitas

YOGYA (KR) - Pola penanganan kawasan kumuh perkotaan kini dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga kalangan swasta. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogya pun menyiapkan layanan Electronic Slum Upgrading Report atau 'e-SURe' guna menjembatani sinergitas antarpihak.

Kepala Dinas PUPKP Kota Yogya, Agus Tri Haryono, mengungkapkan pada 2019 mendatang seluruh kawasan kumuh harus sudah terentaskan. "Di Kota Yogya ini ada 264,9 hektare kawasan kumuh yang sudah ditetapkan oleh walikota. Dibutuhkan kebijakan strategis agar terbangun sinergitas antar pelaku yang berkaitan penataan kawasan kumuh. Sistem informasi 'e-SURe' ini salah satu yang kami kembangkan," paparnya, Senin (19/6).

Menurut Agus, terdapat tujuh indikator kawasan kumuh yang masing-masing ditangani oleh instansi yang berbeda. Yakni masalah perumahan, jalan lingkungan, drainase, air limbah, persampahan, air minum, dan proteksi kebakaran. Sedangkan instansi yang terlibat di antaranya PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebakaran, Bappeda, kecamatan dan lainnya.

Sedangkan dari total 264,9 hektare kawasan ku-

muh yang tersebar di 36 kelurahan, Pemkot harus bekerja keras untuk mencapai target pengentasan pada 2019. Setidaknya dalam setahun harus bisa mengentaskan 85 hektare kawasan kumuh. "Makanya kan dibutuhkan percepatan penanganan. Sehingga perlu ada keterpaduan program dan pembiayaan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan. Layanan 'e-SURe' ini yang akan menjembatani," imbuhnya.

Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PUPKP Kota Yogya, Yunita Rahmi Hapsari menambahkan, sistem informasi 'e-SURe' tersebut akan menyatukan berbagai program penanganan kawasan kumuh yang dilakukan lintas instansi. Harapannya semua data dapat disatukan supaya perkembangan penanganan kawasan kumuh menjadi mudah dipantau.

Seluruh data mengenai peta kawasan kumuh, pihak yang tengah melakukan penanganan, kendala yang dihadapi hingga testimoni dari warga setempat akan disajikan dalam sistem itu. Selain itu, setiap instansi juga diberikan akses untuk memperbarui data agar langsung diketahui oleh instansi lain. "Dalam waktu dekat ini akan kami luncurkan. Nanti akan dapat dilihat dengan mudah masalah yang dihadapi dan jenis program yang dibutuhkan," tuturnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005